

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kerek Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Kecamatan Kerek Tahun 2020 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bojongsari Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan organisasi Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

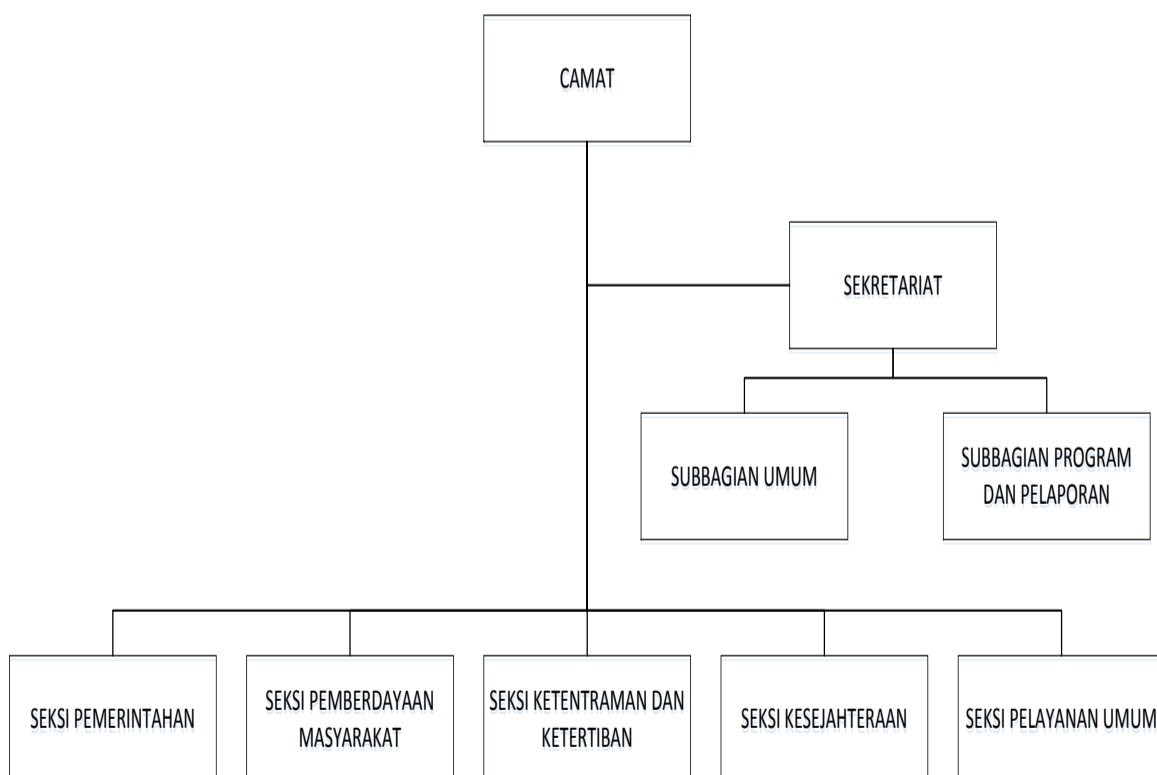
- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - l. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Struktur Organisasi :

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Kerek adalah sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KEREK



1.4 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kerek berpegang kepada aspek strategis organisasi, dan dalam perkembangannya Kecamatan Kerek juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

1. Faktor SDM :

- a) Masih banyaknya SDM yang belum dapat mengoperasikan perangkat Komputer;
- b) SDM yang ada belum sepenuhnya memahami tupoksi sesuai jabatan di masing2 seksi/bagian;
- c) Kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya;
- d) Kompetensi Aparatur masih kurang memadai ;
- f) Kurangnya Jumlah pegawai dilingkungan Kantor Kecamatan karena Pensiun dan belum terisi baik Kasi maupun staf;

2. Faktor sarana dan prasarana :

- a) Ruang kerja yang kurang efektif ;
- b) Sarana dan prasarana yang kurang memadai ;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan;

3.Faktor Kinerja :

- a) Belum berjalannya pembagian kerja yang berdasarkan tupoksi ;
- b) Koordinasi antara atasan dan bawahan yang masih kurang efektif ;
- c) Terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada kecamatan (Program/ Kegiatan yang diberikan kepada kecamatan masih terbatas);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Kerek

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah merupakan salah satu tugas pokok Kecamatan Kerek yang diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa. Pedoman serta arah pembangunan tersebut tertuang dalam visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 s/d 2021 Kecamatan Kerek.

2.1.1 Rencana Kinerja

Rencana kerja Kecamatan Kerek Tahun 2020 penetapannya tentu tetap mendasar kepada Visi dan Misi Kecamatan Kerek, dimana yang menjadi Visi Kantor Kecamatan Kerek adalah :

2.1.2 Visi

Terwujudnya Kecamatan Kerek yang Aman, Religius, Bersih dan Maju”

2.1.3 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan yang Akurat dan Akuntabel;
2. Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan program-program Pemerintah dalam rangka pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kerek.

RENTRA KECAMATAN KEREK TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75,50 (Baik)
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban , umum dan Kesejahteraan Sosial.	100%
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan (Unit)	12
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Kec.	4. Nilai AKIP Kecamatan Kerek	BB

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kerek Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KECAMATAN KEREK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75,50 (Baik)
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan , Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial.	100%
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan (Unit)	12
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Kerek	BB

PROGRAM DAN ANGGARAN KINERJA TAHUN 2020 KEC. KEREK

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	247.424.000	PAPBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.355.696	PAPBD
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	152.300.000	PAPBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	12.984.000	PAPBD
5	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	30.434.000	PAPBD
6	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	9.380.000	PAPBD
7	Program Pembinaan Kemasyarakatan	172.100.000	PAPBD
Total Anggaran		667.977.896	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Kerek Tahun 2020 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kerek selama tahun 2020. Untuk setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75,50 (B)	80,09 (B)	106,07 %	Tercapai
2.	Meningkat - kan penyelesaian Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial.	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan (Unit)	12	6	50 %	Tidak tercapai
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Kec.	4. Nilai AKIP Kecamatan Kerek	71,47 (BB)	71,63 (BB)	100,22 %	Melebihi target capaian

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, 1 untuk Indikator Kinerja Jumlah BUMDes yang tidak tercapai hal ini dikarena kurangnya komitmen dari semua unsur dalam pembentukan BUMDes, sedangkan Nilai AKIP telah mencapai Target 100,22 %, sedangkan untuk Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi kinerjanya mencapai 106,07 % .

1

3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

2

No	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2017	2019	2019	2020	2021	2017	2019	2019	2020	2021	2017	2019	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	100	100	100	100	-
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial	Nilai	60	82	88	94	100	60	82	88	94		100	100	100	100	-
		Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Unit	1	7	10	12	17	1	4	5	6	-	100	57,14	50	50	-
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Kec.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Nilai	CC	B	B	BB	A	CC	B	BB	BB	-	100	100	100	100	-

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kecamatan Kerek pada tahun 2020 dengan tahun 2019 mengalami peningkatan pada hampir seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strategis kecuali pembentukan BUMDes.

3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis .

NO	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET TAHUN. 2020	REALISASI TAHUN 2020
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B
2	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan , Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban umum dan Kesejahteraan Sosial.	Prosentase	94 %	100 %
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan (Unit)	Unit	12	6
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Kec.	6. Nilai AKIP Kecamatan Kerek	Nilai	BB	BB

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis . diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Kerek sudah sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Kerek Tahun 2017-2021.

3.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berdasarkan Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Kerek tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga tidak dapat dilaporkan.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Kerek dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pada tahun 2020 Kecamatan Kerek telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, yaitu : **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik.**

Dengan Indikator Kinerja :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Peningkatanya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa
3. Predikat SAKIP Kecamatan Kerek

Capaian Kinerja pada Tahun 2020 Kecamatan Kerek berdasarkan Indikator Sasaran dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel Capaian Kinerja Kecamatan Kerek Tahun 2020

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Huruf /Angka	B (77,67)	B (75,50)	B (80.09)	Tercapai
2	- Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	Tercapai
	- Peningkatan jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan	Unit	5	12	6	Tidak tercapai
3	-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	Huruf /Angka	BB	BB	BB	Tercapai

Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:

sasaran strategis tersebut memiliki 3 indikator kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai capaian 80,09 dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa nilai capaian sebesar 100% sedangkan untuk Peningkatan BUMDes tidak tercapai disebabkan kurangnya Komitmen semua unsur dalam Pembentukan BUMDes serta Predikat SAKIP Kecamatan Kerek mencapai target nilai 71,63 dengan Kategori BB (sangat Baik).

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan Kerek Tahun 2020 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	667.977.896	591.458.230	88,54
Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan ,Pembangunan,Perekonomian,Ketentraman dan Keterlibatan umum dan Kesejahteraan Sosial.	100	100			
	3.Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan (Unit)	12	6			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Kec.	4.Nilai AKIP Kecamatan Kerek	BB	BB			

Jumlah Anggaran Kegiatan tahun 2020 Rp .667.977.896 Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 591.458.230 Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Kerek untuk Tahun 2020 adalah 88,54 % Capaian ini sebagian besar dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran namun tetap menunjang target kinerja Kecamatan Kerek.

3.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut Misi :

1. Memberikan Pelayanan yang Akurat dan Akuntabel
2. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan program-program Pemerintah dalam rangka pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kerek

Dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial.
3. Jumlah BUMDes pada Tingkat Kecamatan
4. Nilai AKIP Kecamatan Kerek

A. Hasil Capaian Indikator Kinerja Predikat SAKIP Kecamatan Kerek adalah 71,63 dengan Kategori BB (sangat Baik), yang didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)
I	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,49 %
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	100	99,49 %
II	Peningkatan Kualitas Perencanaan	100	46,86 %
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	100	46,86 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Predikat SAKIP, secara umum sudah cukup baik. Seluruh Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai kebutuhan, namun untuk perjalanan Dinas Luar Daerah tdk terserap anggaranya karena dibatasi oleh kondisi Virus COVID-19 Adapun beberapa hal yang perlu penguatan adalah :

Lakip Kecamatan Kerek Tahun 2020

1. Sinergitas perencanaan agar terjadi kesesuaian antara RPJMD, Renstra, Program dan Kegiatan.
2. Monitoring evaluasi capaian kinerja dan keuangan serta Rencana Aksi yang telah ditetapkan secara berkala.
3. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

B. Hasil capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 106,07 %, yang didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)
I	Peningkatan Administrasi Perkantoran	100 %	99,49 %
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	100 %	99,49 %
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	100 %	97,69 %
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	100 %	96,39 %
4	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran	100 %	100 %
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	44,00 %	44,00 %
II	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	85,63 %
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100 %	100 %
2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	100 %	81,00 %
III	Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan di Tingkat Kecamatan	100 %	84,91 %
1	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	78,14 %	78,14 %
IV	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	100 %	98,10 %
1	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	98,55 %
2	Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	100 %	97,53 %
V	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	86,01 %	93,18 %
1	Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	72,98 %	93,18 %

NO	PROGRAM /KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)
VI	Pembinaan Kemasyarakatan	100 %	81,37 %
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	48,77 %	48,77 %
2	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	100 %	94,00 %
3	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran COVID-19	100 %	95,18 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi kinerja dan keuangan dari Program dan Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Survey Kepuasan Masyarakat (IKM), secara umum sudah cukup baik. Seluruh Program/Kegiatan telah selaras dan sesuai kebutuhan. Adapun beberapa hal yang perlu penguatan adalah :

1. Evaluasi efektifitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Penguatan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik, baik di Kecamatan maupun di Desa.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan terhadap masyarakat

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD perubahan Kecamatan Kerek Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Kecamatan Kerek sebesar **Rp. 2.487.609.508,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembila Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah)** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.819.631.612,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 667.977.896,- (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 2.192.805.713,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah)** dengan persentase sebesar **88,15 %** yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.601.347.483,- (Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)** dengan persentase sebesar **88,00 %** dan Realisasi Belanja Langsung.

sebesar **Rp. 591.458.230,-** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan persentase sebesar **88,54 %**. Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Realisasi Anggaran	%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B 75,50	B 80,09	106,07	7.329.400	78,14
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Kec.	2. Nilai AKIP Kecamatan Kerek	BB 71,47	BB 71,63	100,22	584.128.830	88,54

BAB IV P E N U T U P

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran tahun 2020, Kecamatan Kerek telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, diketahui bahwa Kecamatan Kerek mencapai target kinerja sebesar 88,15 %. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut di atas didukung oleh 7 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2020 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Strategis Kecamatan Kerek meliputi :

- a) Masih banyaknya SDM yang belum dapat mengoperasikan perangkat Komputer
- b) Terbatasnya Personil dan Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dikarenakan Kekosongan Jabatan dan Pensiun.
- c) SDM yang ada belum sepenuhnya mengetahui tupoksi sesuai jabatan di masing-masing seksi/bagian.
- d) Kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya
- e) Kompetensi aparatur masih kurang memadai
- f) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- g) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan dan Desa.
- h) Belum berjalannya pembagian kerja yang berdasarkan tupoksi
- i) Koordinasi antara atasan dan bawahan yang masih kurang efektif
- j) Terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan (Program/ Kegiatan yang diberikan kepada kecamatan masih terbatas).

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Kecamatan Kerek memerlukan langkah-langkah taktis dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan keterbatasan ASN dan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 OPD Kecamatan Kerek, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Kerek, Januari 2021

CAMAT - KEREK

SUGENG PURNOMO,S.IP,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670103 198809 1 001

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.000.000	35.045.060	97,35	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	15.710.000	2.950.000	18,78	
	Belanja Barang dan Jasa	15.710.000	2.950.000	18,78	
	Belanja Perjalanan Dinas				
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.710.000	2.950.000	18,78	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.140.432	44.015.698	89,57	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	18.100.000	18.100.000	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000	18.100.000	100,00	
	<i>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</i>				
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.900.000	1.900.000	100,00	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.450.000	9.450.000	100,00	
	<i>Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu</i>				
	Belanja Pakaian Olah Raga	6.750.000	6.750.000	100,00	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	31.040.432	25.915.698	83,49	
	Belanja Barang dan Jasa	31.040.432	25.915.698	83,49	
	Belanja Premi Asuransi				

	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.145.392	1.540.198	48,97	
	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>				
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.400.000	7.395.500	88,04	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.380.000	10.320.000	99,42	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.200.000	900.000	75,00	
	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	7.700.000	5.760.000	74,81	
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	128.200.000	100.988.600	78,77	
	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja	32.500.000	14.486.000	44,57	
	Belanja Pegawai	16.100.000	13.536.000	84,07	
	<i>Uang Lembur</i>				
	Uang Lembur PNS	16.100.000	13.536.000	84,07	
	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000	950.000	67,86	
	Belanja Penggandaan	1.000.000	950.000	95,00	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	95.700.000	86.502.600	90,39	

	Belanja Pegawai	90.900.000	82.886.000	91,18	
	Honorarium PNS				
	Honorarium PPTK	3.300.000.	3.300.000	100,00	
	Honorarium Pembantu PPTK	2.640.000	2.640.000	100,00	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	800.000	800.000	100,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	800.000	800.000	100,00	
	Honorarium Pengguna Anggaran	7.800.000	7.800.000	100,00	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	7.500.000	7.500.000	100,00	
	Honorarium Bendahara Penerimaan	2.700.000	2.700.700	100,00	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	5.700.000	5.700.000	100,00	
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	4.200.000	4.200.000	100,00	
	Honorarium Operator Aplikasi Keuangan Simda	3.900.000	3.900.000	100,00	
	Honorarium Pengguna Barang	4.800.000	4.800.000	100,00	
	Honorarium Operator dan Administrator Sistem Informasi Kepegawaian	2.400.000	2.400.000	100,00	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	4.200.000	1.050.000	25,00	
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna	4.200.000	4.200.000	100,00	
	Honorarium Non PNS				

	Honorarium Non PNS Kegiatan	27.200.000	24.400.000	89,71	
	Uang Lembur				
	Uang Lembur PNS	6,260.000	6.056.000	96,74	
	Uang Lembur Non PNS	2.500.000	640.000	25,60	
	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	3.616,600	75,35	
	Belanja Bahan Pakai Habis				
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.000.000	1,988.000	99,40	
	Belanja Jasa Kantor				
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	300.000	63.000	21,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan				
	Belanja Penggandaan	2.000.000	1.565.600	62,62	
	Belanja Penjilidan	500.000	44.000	8,80	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	10.744.000	9.080.000	84,51	
	<i>Fasilitas Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa</i>	10.744.000	9.080.000	84,51	
	<i>Belanja Pegawai</i>	1.984.000	1.880.000	94,76	
	Uang Lembur				
	Uang Lembur PNS	1.984.000	1.880.000	94,76	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.760.000	7.200.000	82,19	

	Belanja Makanan dan Minuman				
	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	3.000.000	3.000.000	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000	4.200.000	72,92	
	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	65.365.000	23.412.600	35,82	
	<i>Fasilitas Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa</i>	11.434.000	7.698.000	67,33	
	<i>Belanja Pegawai</i>	2.646.000	1.128.000	45,78	
	Uang Lembur				
	Uang Lembur PNS	1.824.000	1.128.000	61,84	
	Belanja Barang dan Jasa	8.970.000	6.570.000	73,24	
	Belanja Makanan dan Minuman				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3000.000	2.250.000	75,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.970.000	4.320.000	72,36	
	<i>Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	53.931.000	15.714.600	29,14	
	Belanja Pegawai	2.464.000	1.128.000	45,78	
	Uang Lembur				
	<i>Uang Lembur PNS</i>	1.824.000	1.128.000	61,84	
	Belanja Barang dan Jasa	51.467.000	14.586.600	28,34	
	<i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>				

	Belanja Penggandaan	5.000.000	387.600	7,75	
	Belanja Makanan Dan Minuman				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	2.250.000	75,00	
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	19.987.000	3.549.000	17,76	
	Belanja Perjalanan Dinas				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.080.000	4.950.000	69,92	
	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan				
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	15.400.000	3.450.000	22,40	
	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	9.380.000	5.700.000	60,77	
	Operasional Pelaksanaan Perijinan Di Tingkat Kecamatan	9.380.000	5.700.000	60,77	
	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000	5.700.000	60,77	
	Belanja Cetak dan Penggandaan				
	Belanja Penggandaan	2.000.000	0	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	Belanja Makan dan Minum Rapat	3.420.000	2.640.000	77,19	
	Belanja Perjalanan Dinas				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000	3.060.000	77,27	

	Program Pembinaan Kemasyarakatan	20.000.000	17.376.000	86,88	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan</i>	11.000.000	8.526.000	77,51	
	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	8.526.000	77,51	
	<i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.026.000</i>	<i>51,30</i>	
	Belanja Penggandaan	1.500.000	890.000	59,33	
	Belanja Penjilidan	500.000	136.000	27,20	
	<i>Belanja Makan dan Minum</i>				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100,00	
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	4.500.000	75,00	
	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	9.000.000	8.850.000	98,33	
	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000	11.220.000	97,57	
	<i>Belanja Makan dan Minum</i>				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100,00	
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	5.850.000	97,50	
	SURPLUS (DEFISIT)	2.463.213.123,81	2.061.320.570,86	83,68	

III.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan rencana capaian (target) yang telah ditetapkan tahun 2020 yang didukung dengan rincian program yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75,50 (Baik)	80.09 (Baik)
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial.	100%	100%
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan (Unit)	12	6
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Kerek	BB	BB

Pencapaian target terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dapat tercapai semua kecuali Jumlah BUMDes dari 17 Desa di wilayah Kecamatan Kerek baru 6 Desa yang mempunyai BUMDes.

Pelayanan umum kepada masyarakat pada tahun 2020 ada Sedikit Peningkatan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **80,09** Hal ini disebabkan adanya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung pelayanan umum seperti Ac Ruang Pelayanan, Tempat Ibu menyusui, Westafel, No Antrian, Almari Dokumen sebagai penunjang fasilitas pelayanan untuk masyarakat berlahan dapat terpenuhi sehingga untuk peralatan dan perlengkapan kerja yang ada dalam memberikan pelayanan cukup bagus dan optimal .

Kegiatan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga telah dilaksanakan secara baik. Hal ini disebabkan karena intensitas pembinaan dan pendampingan terhadap penanganan PKH, Bansos, KIS, BPNT, Surat Keterangan Tidak Mampu Bantuan tempat ibadah, TPQ, Bantuan Rantang Makan Bagi Masyarakat (Warung Rantangan Basnas) yang benar – benar tidak mampu sudah tidak dapat di berdayakan di 3 Desa yaitu Jarorejo Karanglo dan Margorejo Karang taruna, Pramuka, Pembinaan PKK, Pembinaan KONI Kecamatan, Penyusunan bantuan untuk olahraga, Penyelenggaraan event olahraga PORKAB.

Kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan telah dilaksanakan secara baik Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan dan pendampingan penanganan penyelesaian persoalan intern dan antar umat beragama, fasilitasi kegiatan Keaksaraan Fungsional, pameran seni dalam rangka Hari Jadi Tuban, fasilitasi desa siaga dan fasilitasi kegiatan Posyandu Balita dan Lansia.

Kejahatan di masyarakat mengalami penurunan dan penanganan bersama MUSPIKA. .Pembuatan Saluran Air Sepanjang Jalan Ibu Kota Kecamatan (Montong – Kerek) untuk mengantisipasi banjir karena bila hujan deras air meluap yang menyebabkan banjir telah dibangun .

Sikap toleransi umat beragama yang semakin meningkat yang ditandai dengan semakin tidak adanya sengketa keagamaan Hal ini disebabkan intensifnya kegiatan pembinaan forum-forum keagamaan berupa kegiatan menghadiri undangan pengajian dan rapat-rapat koordinasi lintas agama.

Pelanggaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Perda yang berlaku segera di tidaklanjuti semua Hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan sosialisasi maupun upaya pendekatan kepada dunia usaha terkait dengan retribusi perijinan-perijinan seperti HO dan IMB oleh Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kerek.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi yang ditandai dengan antusiasme masyarakat dalam menyambut program pembentukan

fasilitasi pembentukan Kopwan dan kegiatan Pembangunan Swakelola oleh desa. Sedangkan tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Desa, Kecamatan juga meningkat karena hasil-hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.

Lampu penerangan jalan umum semakin meningkat fungsinya karena tidak ada yang mati. Hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap seluruh lampu penerangan jalan umum oleh UPTD Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan Kerek.

Perencanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kerek antar instansi vertikal di Kecamatan Kerek semakin sinkron dan sinergis, Hal ini disebabkan karena tersusunnya Renstra, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKPJ, LKJIP, LPPD, Pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan secara maksimal dan akuntabel sebesar 100 % karena sudah menerapkan aplikasi program Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan karena administrasi keuangan sudah menerapkan aplikasi SIMDA dan Aplikasi Baru SIPD dalam pembuatan RKA, DPA, DPPA, SPP, SPM, laporan bulanan, laporan tribulan dan laporan semesteran serta laporan tahunan (LRA), Neraca dan lain sebagainya yang didukung oleh adanya Lap Top untuk aplikasi SIMDA, e-Planning, e-SAKIP, SI DASI JABATAN dan SIPD. Adapun untuk Administrasi Gaji juga telah menggunakan aplikasi Gaji dari PT. Taspen. penyelenggaraan rapat koordinasi dengan instansi di Kecamatan Kerek secara rutin setiap bulan dan insidentil sesuai dengan kebutuhan.

Administrasi pemerintahan desa dan lembaga pemasyarakatan yang beradministrasi baik semakin meningkat dengan target Hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan pembinaan Seksi pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap administrasi desa rutin setiap bulan melalui rapat konferensi sekdes dan kasi/kaur desa.

Administrasi pengelolaan barang milik daerah cukup baik. Hal ini disebabkan karena adanya verifikasi terhadap barang milik daerah yang terdapat pada Kantor Kecamatan Kerek serta laporan pengurus barang, namun dinilai masih perlu adanya peningkatan SDM bagi pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah secara baik.

Penyusunan laporan kinerja juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena tertibnya penyusunan laporan kegiatan Camat, laporan realisasi PBB dan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Rata-rata indikator kinerja penggunaan dana pada Kecamatan Kerek pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **88,15 %** Yang terdiri atas Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kinerja anggaran Kecamatan Kerek tahun 2020 baik. Efisiensi kinerja anggaran tersebut didukung oleh pola perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

Berdasarkan indikator kinerja yang ada, rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kerek tahun 2020 menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Kerek Tahun 2020 termasuk dalam klasifikasi baik. Adapun penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, daftar dan tabel termuat dalam lampiran-lampiran laporan ini.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2020 memuat program dan kegiatan tahun 2020. Adanya keberhasilan dan kegagalan dapat di lihat dari jumlah kegiatan yang dapat di realisasikan di mana secara umum OPD Kecamatan Kerek telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik terhadap sasaran – sasaran yang telah di tetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja di samping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan hal ini harus di cari jalan keluarnya hambatan tersebut antara lain masih rendahnya kemampuan / ketrampilan yang di miliki personil Kecamatan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kerek dalam mengantisipasi tantangan dan hambatan di lapangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Membuat landasan hukum SOTK Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatkan ketrampilan Aparat melalui pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya untuk solusi permasalahan masing masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan.

- a. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Pegawai.
- b. Mengadakan pembinaan Apel Pagi, Upacara 17 - an dll.

2. Bidang Pemerintahan.

- a. Mengadakan pertemuan dan koordinasi sebulan sekali dimasing-masing desa.
- b. Pendampingan dari pendamping desa untuk penyusunan RAB.
- c. Mengadakan pembinaan administrasi desa..

3. Bidang Pelayanan Umum.

- a. Jika permohonan yang harus ditandatangani pimpinan (Camat) yang tidak bisa didelegasikan ke Kasi/Kasubag maka pemohon diminta untuk meninggalkan alamat dan no HP sehingga jika sudah selesai bisa dihubungi atau diantar sampai ke alamat pemohon.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- a. Untuk desa pengajuan pembangunan terealisasi dengan melalui anggaran APBDes.
- b. Untuk Program-program yang ada perlu adanya Pembinaan Pemberdayaan Kegiatan bagi Desa dan Pendampingan dari semua pihak (PID, BUMDes, RTLH, HIPAM)

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Dilakukannya sosialisasi dan masyarakat mengenai Perda yang baru tentang perijinan Usaha
- b. Kewenangan terhadap kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara intensive tentang Pelaksanaan Pengamanan Wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban serta perlu adanya Pembekalan / Bimtek di Tingkat Desa.

6. Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

- Memberikan pembinaan dan pengarahan Kepada Penerima Dana Hibah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 OPD Kecamatan Kerek, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kerek, Januari 2021

CAMAT - KEREK

SUGENG PURNOMO,S.IP.MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19670103 198809 1 001

